

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesatuan hidup masyarakat yang bersandar pada tradisi, norma, dan adat istiadat akan menghasilkan masyarakat dengan berbagai macam corak serta bentuk kehidupan. Dimana bentuk kehidupan bertujuan untuk meraih cita-cita kehidupan bersama. Secara umum, kehidupan manusia mempunyai jenis dan ragam yang berbeda-beda, selaras dengan kemampuan dari setiap insan. Kemampuan seseorang dipengaruhi oleh minat dan bakat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seluruh hal akan tercapai sesuai dengan keinginan hidup yang didambakan, apabila terdapat keinginan dan bakat. Dengan demikian, kunci keberhasilan hidup manusia, yaitu minat, bakat, dan keinginan. Manusia memiliki akal budi untuk menghasilkan suatu kebudayaan. Melalui akalnya manusia dapat berkarya dan berfikir untuk menghasilkan berbagai hal yang diharapkannya. Dengan adanya hal tersebut maka lahirlah sebuah kebudayaan (Sahadi, 2019).

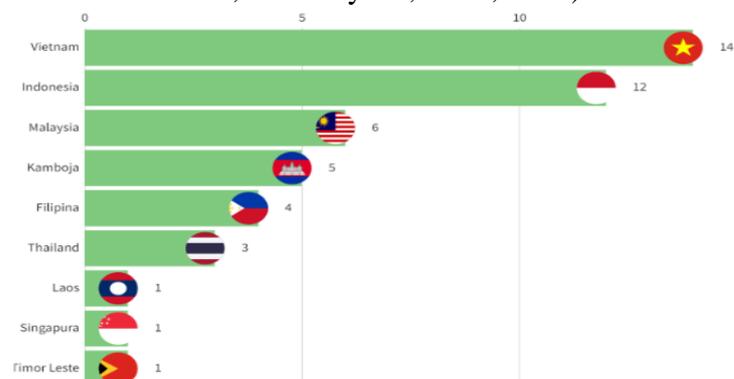
Kebudayaan sebagai sarana bagi seseorang untuk beradaptasi terhadap sosial budaya dan lingkungan alamnya, serta untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Kusuma, Grinata, Hendrian Yonata, 2020). Kebudayaan sangat melekat pada seluruh negara di dunia. Hal tersebut juga tentunya dialami oleh Negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang melimpah akan kebudayaan, baik itu kebudayaan material maupun nonmaterial. Menurut (Koalisi Seni Indonesia, 2017), dalam hal pengelolaan kekayaan budaya di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebagai dasar untuk perancangan arah pemajuan kebudayaan nasional, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan merupakan dokumen yang memuat permasalahan dan kondisi nyata dari setiap daerah beserta tawaran solusinya. Berdasarkan rancangan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengupayakan pemajuan budaya, baik itu di tingkat lokal maupun nasional.

Pada tahun 2020 pemerintah menyelenggarakan acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Pekan Kebudayaan Nasional 2020 adalah festival kebudayaan bertaraf nasional pertama kali di Indonesia. Acara tersebut bertujuan untuk mengupayakan pemajuan kebudayaan, dan sebagai salah satu sarana untuk lebih menguatkan ketahanan budaya. Komunikator dibalik terselenggarakannya acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020, yaitu Humas Kemdikbud melalui via daring (Fildzah & Atmadi, 2022).

Pekan Kebudayaan Nasional 2020 disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut karena Pekan Kebudayaan Nasional 2020 menjadi salah satu ajang untuk mengajak masyarakat agar mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Selain itu juga, Pekan Kebudayaan Nasional 2020 menjadi ajang kolaborasi budaya antar negara, bertujuan agar masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia saling memahami dan mengerti tentang budaya negara-negara di dunia, dan bertujuan agar masyarakat Indonesia lebih mengenali secara mendalam mengenai berbagai macam kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Serangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 menampilkan dan memasarkan berbagai jenis Warisan Budaya Takbenda (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2020).



**Gambar 1. 1 Negara di Asia Tenggara dengan WBtb Terbanyak (UNESCO *Intangible Cultural Heritage*, 2023)**

Terlihat dari gambar di atas bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara sebagai negara yang mempunyai Warisan Budaya Takbenda terbanyak setelah Negara Vietnam. Data tersebut juga diperkuat dengan data yang berasal dari Kemdikbud, bahwa terdapat lebih dari 500 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan, lebih dari 70.000 yang tercatat, dan 12 diantaranya telah diakui oleh UNESCO (Kemdikbud, 2022).

Menurut Koentjaraningrat dalam (Sumarto, 2019) kebudayaan yang melekat pada manusia mempunyai 7 (tujuh) unsur yang bersifat umum, yaitu sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem peralatan dan teknologi, sistem organisasi masyarakat, bahasa, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Seluruh unsur tersebut mempunyai karakteristik dan keunikannya masing-masing, termasuk dalam hal unsur kesenian.

Pada perkembangannya kesenian sangat terikat pada kehidupan masyarakat tertentu, hal ini demikian karena kesenian tradisional muncul, tumbuh dan berkembang didalam lingkungan masyarakatnya itu sendiri (Soleman et al., 2020). Seiring dengan perubahan zaman dan globalisasi yang begitu cepat, akan menyebabkan dampak terhadap seluruh bentuk tradisi dan budaya termasuk kesenian. Dimana kesenian pada kehidupan masa lalu tersebut akan semakin ditinggalkan. Dengan demikian, diperlukan adanya sebuah pelestarian kesenian masa lalu yang diterapkan pada kehidupan masyarakat saat ini. Kesenian tradisional (warisan nenek moyang) harus tetap dijaga keutuhannya, hal tersebut karena kesenian tradisional mempunyai peranan yang sangat besar, yaitu berperan sebagai identitas suatu bangsa. Identitas suatu bangsa mampu untuk menunjukkan dan menyatukan jati diri bangsa.

Seluruh Provinsi di Indonesia terus berupaya untuk melestarikan kesenian tradisional. Menurut (Irhandayaningsih, 2018), kesenian dapat dilestarikan dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) *Culture Experience*, yakni dengan cara terjun langsung untuk mempelajari budaya masing-masing daerah sesuai dengan daerahnya; dan (2) *Culture Knowledge*, yakni dengan membuat pusat informasi

kebudayaan masing-masing, sehingga setiap orang dengan mudah dapat menemukan informasi tentang kebudayaan di suatu daerah.

Pemerintah Jawa Barat terus berupaya untuk melestarikan berbagai budaya di Provinsi Jawa Barat. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Jawa Barat, berupa penayangan program acara Kandaga di stasiun televisi lokal TVRI Jawa Barat. Melalui program acara Kandaga terdapat nilai pendidikan yang dihasilkan, yaitu masih banyaknya antusias anak kecil bahkan anak muda yang mempunyai tempat untuk melestarikan budaya melalui berlatih aktif dalam kesenian budaya (Namira, 2017).



**Grafik 1. 1 Lima Provinsi Peraih Anugerah Kebudayaan Terbanyak (Penulis, 2023)**

Sesuai dengan gambar di atas bahwa Jawa Barat menduduki peringkat kedua sebagai Provinsi dengan kategori peraih Anugerah Kebudayaan Terbanyak yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui acara Anugerah Kebudayaan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan tujuan pelestarian budaya. Jacobus dalam (Namira, 2017), menyatakan bahwa pelestarian norma lama, yaitu bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, selektif, luwes, dan menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang selalu berkembang serta berubah.

Salah satu kota yang berada di Jawa Barat yang berkontribusi dalam pelestarian budaya adalah Kota Bandung. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu dengan melestarikan bangunan cagar budaya di beberapa Kawasan di Kota Bandung. Bangunan cagar budaya adalah salah satu bentuk identitas suatu kota. Bangunan tersebut juga merupakan satu dari sisa peninggalan sejarah pada masa lampau. Namun, menurut pemilik bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Braga, mengatakan bahwa peran sosialisasi dari pemerintah belum berjalan baik. Hal demikian dapat terjadi karena Pemerintah Kota Bandung lebih terfokus dalam hal melaksanakan sosialisasi pada bangunan cagar budaya di kawasan atau wilayah yang lebih familiar (Rahman & Darwin, 2022).

Dalam hal pelestarian kebudayaan di Kota Bandung, Kota Bandung masih mempunyai kesenian yang berstatus terancam punah. Dalam (Barat, 2022), data di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, pada tahun 2018-2021 Kota Bandung dinobatkan menjadi salah satu kota yang mempunyai kesenian tradisional dengan status terancam punah di Provinsi Jawa Barat.

Pada saat ini keberadaan kesenian tradisional sedang terancam. Keterancamannya tersebut disebabkan oleh masuknya kebudayaan asing yang dapat diakses begitu cepat melalui perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Situasi tersebut merupakan gangguan dan ancaman terhadap ketahanan nasional Negara Indonesia dalam bidang budaya (Mantri, 2014).

Keterancamannya kesenian tradisional dapat merujuk pada terancamnya sebuah kesenian tradisional. Menurut Waluyo dalam (Setiawan, 2018) merujuk pada formula Warisan Budaya Takbenda yang dikeluarkan oleh UNESCO, bahwa kriteria terancam punah merupakan setingkat lebih rendah di bawah kriteria berkurang, namun berada di atas kriteria sudah punah, karena karya budaya yang dimaksud masih ada dan masih mempunyai pelaku budaya atau maestro.

Secara praktik di lapangan kesenian tradisional di Kota Bandung yang hampir punah salah satunya, yaitu seni benjang gulat. Menurut (Wahyuni et al., 2021), benjang gulat merupakan seni bela diri tradisional yang populer di

wilayah Ujungberung. Kesenian ini termasuk ke dalam jenis kesenian rakyat yang memadukan antara bela diri dengan tarian. Pertunjukan benjang gulat diiringi dengan beberapa macam alat musik, di antaranya terebang, bedug, terompet, kecrek, dan gendang.

Seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk mempertahankan kelangsungan dan keberadaan budaya daerah, terutama pemerintah daerah. Pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan ketahanan budaya daerah. Dimana pemerintah daerah berperan sebagai pihak untuk meningkatkan seluruh aspek ketahanan budaya daerahnya (Mantri, 2014). Termasuk penting adanya peran dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melestarikan kesenian tradisional Benjang Gulat di Kota Bandung yang statusnya kini terancam punah. Status terancam punah tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya kampanye yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan dan memperkenalkan kesenian tradisional Benjang Gulat sebagai salah satu kebanggaan Kota Bandung (Nowalati, 2019).

Peran pemerintah daerah terhadap pelestarian kesenian benjang gulat dapat dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan, yang mana tata kelola pemerintahan tersebut dapat dikatakan baik atau optimal apabila seluruh prinsip dalam tata kelola tersebut sudah terlaksana dengan baik dan seluruh permasalahan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dapat teratasi dengan solusi yang risikonya paling kecil. Adapun kualitas tata kelola pemerintahan disuatu daerah dapat diukur melalui persepsi dari masyarakat di daerah tersebut. Dimensi-dimensi persepsi masyarakat menurut (Robbins, Stephen P, 2011), yakni dimensi pelaku persepsi atau perseptor, objek persepsi, dan situasi lingkungan saat persepsi itu muncul.

Sehingga persepsi masyarakat Kecamatan Ujungberung dapat dijadikan alat ukur untuk mengetahui kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Ujungberung dalam hal pelestarian kesenian benjang gulat yang statusnya saat ini hampir punah. Penelitian ini sangat penting adanya, hal tersebut karena penelitian ini membahas mengenai sudah sejauh mana tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung dalam hal

pelestarian kesenian benjang gulat, yang pada dasarnya kesenian tersebut merupakan identitas budaya masyarakat Ujungberung itu sendiri. Lebih lanjut lagi, apabila penelitian ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada keberadaan kesenian benjang gulat di masa yang akan datang, yang mungkin saja akan punah sewaktu-waktu, sehingga identitas budaya di daerah Ujungberung akan hilang serta anak cucu kita tidak akan bisa melihat secara langsung keunikan warisan budaya turun temurun yang sudah berumur berabad-abad ini, dimana seharusnya budaya kesenian benjang gulat menjadi budaya kebanggaan masyarakat Ujungberung sampai kapanpun dan dimanapun ia berada.

Dibandingkan dengan daerah lain, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat tidak mempunyai kesenian tradisional yang hampir punah. Data tersebut berdasarkan pada data yang berada pada laman portal Open Data Jawa Barat, bahwa pada tahun 2018-2021 Kabupaten Bandung Barat tidak mempunyai kesenian tradisional dengan status hampir punah (Barat, 2022). Dalam melestarikan salah satu kesenian tradisional di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat melakukan pelestarian dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan, seperti pelatihan, pameran, pendidikan, festival, lomba, dan lain-lain (Aziz et al., 2019).

Dengan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelestarian Kesenian Benjang Gulat Di Kecamatan Ujunberung Kota Bandung”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Berdasarkan data di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, pada tahun 2018-2021 Kota Bandung dinobatkan menjadi salah satu kota yang mempunyai kesenian tradisional dengan status terancam punah di Provinsi Jawa Barat

2. Dengan adanya perubahan zaman, globalisasi dan modernisasi akan berdampak pada seluruh tradisi dan budaya termasuk kesenian Benjang Gulat di Kota Bandung Jawa Barat.
3. Kesenian Benjang Gulat di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung berada pada status terancam punah.
4. Kurangnya peran pemerintah Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dalam hal melestarikan dan memperkenalkan kesenian tradisional Benjang Gulat sebagai salah satu kebanggaan Masyarakat Ujungberung, sehingga kesenian ini terancam punah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dilatar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dalam pelestarian kesenian benjang gulat di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dalam pelestarian kesenian benjang gulat di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung secara simultan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dalam pelestarian kesenian benjang gulat di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung secara parsial.
2. Mengidentifikasi pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dalam pelestarian kesenian benjang gulat di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung secara simultan.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori mengenai persepsi masyarakat dan tata kelola pemerintahan melalui teori penghubung bahwa persepsi berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, dan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

### **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam konteks teori, peneliti berkeinginan untuk mengungkap teori persepsi dari Robbins (2011), teori tata kelola pemerintahan dari Sedarmayanti (2017), dan teori penghubung (persepsi berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan) dari Handayani, dkk (2023). Peneliti mengharapkan pengujian teori yang digunakan dalam penelitian, dapat menghasilkan pengetahuan baru. Agar pengetahuan baru tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan dan sumber rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di suatu kota maupun daerah.

#### **2. Manfaat Praktik**

- a. Bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana Administrasi Publik, meskipun manfaat lainnya karena objek dan lokus penelitian berada di lingkungan peneliti, dengan demikian peneliti dapat menambah khazanah sosial untuk masyarakat sekitar.
- b. Bagi universitas, dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Administrasi Publik, dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas yang dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lainnya.
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai media untuk mengemukakan persepsi terhadap pemerintah, yang dalam hal ini yaitu terhadap tata kelola pemerintahan dalam pelestarian kesenian. Dimana persepsi masyarakat tersebut belum tersampaikan dalam bentuk apapun.

- d. Bagi pemerintah Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran dalam pelestarian kesenian daerah yang hampir punah serta untuk menentukan solusi yang tepat mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pelestarian suatu kesenian tradisional di Kota Bandung.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengulas topik tentang persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dalam pelestarian kesenian benjang gulat di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Penelitian ini berada pada ruang lingkup rumpun ilmu administrasi publik. Administrasi publik merupakan proses usaha Kerjasama beberapa orang yang berada di sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang dilakukan secara efisien.

Selain itu, administrasi publik identik dengan bagaimana peran pemerintah yang mempunyai kuasa, turut aktif dan mempunyai inisiatif dalam hal menetapkan dan mengatur keputusan. Dengan demikian, administrasi publik dalam arti yang sederhana ialah rumpun ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana pengaturan suatu organisasi di ruang lingkup publik.

Dalam rumpun ilmu administrasi publik, terdapat salah satu sub keilmuan yang berkaitan dengan publik, yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai usulan arah dalam hal tindakan yang disarankan oleh pemerintah, kelompok, atau individu untuk menyelesaikan hambatan dan untuk memaksimalkan peluang pada suatu lingkungan dalam rangka untuk mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan publik mempunyai tahapan analisis kebijakan publik, yakni tahap penyusunan agenda, tahap perumusan kebijakan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Seluruh tahapan tersebut sangat penting dan saling berhubungan, dengan demikian suatu tahap analisis kebijakan publik akan berdampak secara langsung pada tahapan analisis kebijakan publik lainnya. Salah satu tahapan analisis kebijakan publik yang sangat penting yakni terdapat

pada proses evaluasi kebijakan. Menurut Mustopadidija dalam (Silitonga, 2018), evaluasi kebijakan berupa kegiatan dalam hal manajemen proses kebijakan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan, pemantauan, pertanggungjawaban, maupun pengawasan.

Evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai metode atau cara. Salah satu metode dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu melalui pengukuran terhadap persepsi masyarakat. Persepsi merupakan suatu proses pemahaman terhadap sesuatu yang berada di lingkungan sekitar. Persepsi seseorang atau masyarakat terhadap objek akan dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuannya atau pemahamannya terhadap objek tertentu. Penilaian tersebut dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, kepentingan, dan harapan. Apabila semua penilaian tersebut bersifat negatif cenderung akan menghasilkan persepsi yang negatif pula, demikian sebaliknya, apabila semua penilaian tersebut bersifat positif cenderung akan menghasilkan persepsi yang bersifat positif atau baik.

Dalam persepsi terdapat beberapa dimensi, yaitu dimensi pelaku persepsi, dimensi objek persepsi, dan dimensi konteks situasi persepsi. Dimensi pelaku persepsi berkaitan dengan aspek sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Dimensi objek persepsi melingkupi unsur kebaruan, gerak, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan objek. Kemudian, dimensi konteks situasi persepsi berkaitan dengan waktu, pengaturan kerja, dan pengaturan sosial.

Dimana dalam penelitian ini persepsi yang ditunjukkan yakni persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun persepsi masyarakat yang diukur adalah turunan dari rumpun ilmu administrasi publik. Turunan dari ilmu administrasi publik yang dimaksud, yaitu *governance* atau tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan merupakan sebuah konsep yang berpatokan terhadap proses penyelenggaraannya dan pencapaian keputusan yang dilakukan secara bersama-sama, namun hal tersebut dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Tata kelola pemerintahan dituntut untuk menghasilkan kekuatan diantara pihak swasta, pihak masyarakat, dan pihak pemerintah itu sendiri. Sehingga

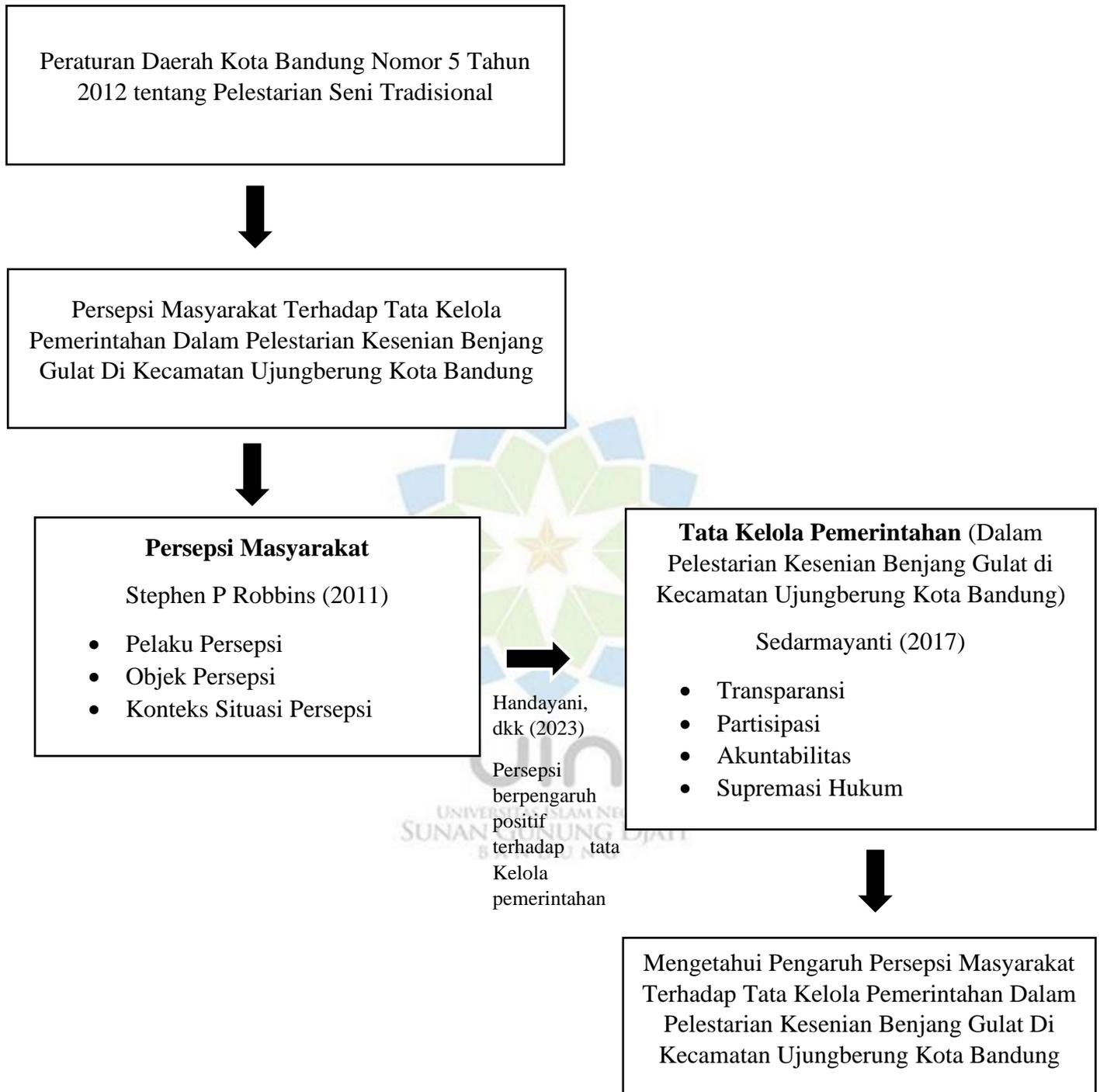
dalam hal ini pihak pemerintah merupakan pihak utama demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia telah diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, asas penyelenggaraan negara yang dimaksud, yaitu asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas efektivitas, dan asas efisiensi (Widi Nugrahaningsih, 2013). Pada penelitian ini *good governance* yang dimaksud yaitu pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada pelestarian kesenian benjang gulat.

Lebih lanjut lagi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, dengan didasarkan pada teori penghubung mengenai pengaruh persepsi terhadap tata kelola pemerintahan. Teori penghubung tersebut disampaikan oleh Handayani, dkk (2023), yang menyatakan bahwa persepsi berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan. Dimana dalam penelitian ini, yakni tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan pelestarian kesenian benjang gulat.

Benjang gulat merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Benjang gulat dapat didefinisikan sebagai kesenian yang memadukan antara seni bela diri dengan seni tari yang diiringi dengan alat musik tradisional. Penelitian ini mengambil fokus tata kelola pemerintahan mengenai pelestarian kesenian benjang gulat, dikarenakan kesenian benjang gulat tersebut sekarang ini sudah berada pada status terancam punah atau hampir punah. Oleh karena itu, urgensi mengenai pelestarian kesenian benjang gulat menjadi hal yang utama di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Beberapa kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran (Peneliti, 2023)**